

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN ESELON I KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI

Tahun Sidang

2016-2017

Masa Persidangan

: V

Jenis Rapat

: Rapat Dengar Pendapat

Dengan

: Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Sekjen, Irjen, Dirjen Minerba, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Ka Balitbang, Ka Badiklat, Ka. Badan Geologi Kementerian ESDM,

Sekjen DEN, Ka. BPH Migas, dan Ka. SKK Migas)

Sifat Rapat

Terbuka

Hari, tanggal

Kamis, 15 Juni 2017

Waktu

Pukul 11.00 WIB s.d 21.30 WIB

Tempat

Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I

Ketua Rapat

H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA

(Ketua Komisi VII DPR RI)

Sekretaris Rapat

Dra. Nanik Herry Murti

Hadir Anggota

Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI

Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

Hadir Pemerintah

Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Sekjen, Irjen, Dirjen Minerba, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Ka Balitbang, Ka Badiklat, Ka. Badan Geologi Kementerian ESDM,

Sekjen DEN, Ka. BPH Migas, dan Ka. SKK Migas)

Acara

Pembahasan RKP dan RKA-K/L RAPBN TA. 2018

Kementerian ESDM RI

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

- Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 dibuka pukul 11.20 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA dan terbuka untuk umum.
- Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara: Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L RAPBN TA. 2018 Kementerian ESDM RI.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI dapat menerima penyesuaian alokasi anggaran di Kementerian ESDM pada program yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan/aspirasi masyarakat, dengan penambahan program pada satuan kerja:

a) Ditjen EBTKE:

 PLTS Komunal di kawasan Perbatasan, Rooftop di Pos Jaga TNI dan Pos Pengamat Gunung Api

b) Ditjen Migas:

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga
- Pembangunan Pipa Transmisi Jaringan Gas
- Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan
- Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg
- Verifikasi LPG 3 Kg
- c) Badan Geologi:
 - Pemboran Air Bawah Tanah
 - Revitalisasi peralatan mitigasi kebencanaan geologi

d) Badan Litbang:

- Pemasangan Burner Gasifikasi Mini Batubara/Gasmin untuk IKM
- Pemutakhiran Peralatan Survey Geomarin III sesuai standar migas

Sehingga pagu indikatif pada Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam RAPBN TA 2018 sebesar Rp. **6.527.274.094.000** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut:

(Rp. Ribu)

Unit	Program	Perubahan Pagu Indikatif 2018 ^{*)}
	KESDM	6.527.274.094
Setjen	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM	374.352.833
Setjen	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	10.000.000
Itjen	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	92.955.486
Dj.Migas	Pengelolaan & Penyediaan Migas	1.935.816.348
Dj.Gatrik	Pengelolaan Ketenagalistrikan	160.209.955
Dj.Minerba	Pembinaan & Pengusahaan Minerba	434.377.864
Setjen DEN	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	58.999.494
Balitbang	Penelitian & Pengembangan Kementerian ESDM	609.609.136
BP SDM	Pengembangan SDM ESDM	510.974.869



Geologi	Penelitian, Mitigasi & Pelayanan Geologi	816.403.839
врн	Pengaturan & Pengawasan Penyediaan & Pendistribusian Bahan Bakar Minyak & Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	156.355.740
Dj.EBTKE	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi	1.367.218.530

Catatan *) Termasuk:

Belanja pegawai sebesar Rp.1.466.273.108.000

Belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp.411.712.398.000

Pengurangan anggaran fungsi pendidikan dari semula Rp.135.000.000.000 menjadi Rp.109.756.394.000 pada Satker STEM AKAMIGAS

- 2. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk membuat matrik program RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2018 yang diselaraskan dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI.
- Komisi VII DPR RI meminta DEN melakukan sinkronisasi Rencana Umum Energi Nasional dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan peraturan perundangan lainnya.
- 4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM RI agar memastikan bahwa program tahun 2017 sudah mulai berjalan paling lambat akhir bulan Juni 2017.
- 5. Komisi VII DPR RI meminta kepada seluruh Eselon I Kementerian ESDM untuk mengkomunikasikan setiap program yang dilaksanakan di daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI baik jenis maupun waktu kegiatan secara lebih dini, agar bisa memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- 6. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan rapat dengan Ketua LKPP, Jaksa Agung, dan Ketua KPK untuk mendalami legalitas mekanisme lelang penggunaan dana APBN di Kementerian ESDM yang dilaksanakan oleh BUMN yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk yang bertindak sebagai PPK dan Pokja.
- 7. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sektor hilir migas di Ditjen Migas dan BPH Migas.
- 8. Komisi VII DPR RI tidak setuju pencabutan subsidi listrik 450 VA.
- Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk mengevaluasi pengurangan subsidi listrik 900 VA agar benar-benar tepat sasaran.



10. Komisi VII DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk memberikan jawaban tertulis secara detil dan terperinci atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI serta menyerahkan kekurangan materi paparan dan disampaikan paling lambat tanggal 4 Juli 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 21.30 WIB

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ESDM RI Jakarta, 15 Juni 2017 KETUA RAPAT,

M. TEGUH PAMUJI, S.H., M.H.

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA